



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL Pencarian dan
PERTOLONGAN/BASARNAS)

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Maret 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 13.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Membahas Hapsem BPK Semester I Tahun 2020; 2. Membahas dan menetapkan refocusing Program/kegiatan TA 2021; 3. Membahas Penanganan Infrastruktur Pasca Bencana; 4. Membahas penanganan <i>Food Estate</i> dan Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Pangan
Ketua Rapat	: Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: ... orang Anggota dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI secara fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI Kementerian PUPR pada hari ini adalah Membahas Hapsem BPK Semester I Tahun 2020; Membahas dan menetapkan refocusing Program/kegiatan TA 2021; Membahas Penanganan Infrastruktur Pasca Bencana; dan Membahas penanganan *Food Estate* dan Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Pangan.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I (Hapsem) tahun 2020. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah konkret agar temuan-temuan dalam Hapsem I BPK Tahun 2020 tidak terulang lagi.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Menteri PUPR mengenai *refocusing* dan realokasi anggaran TA. 2021 sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-30/MK.02/2021 tertanggal 12 Januari 2021 Tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2021 dan percepatan penarikan PHLN serta luncuran SBSN, sebagai berikut:

(dalam ribu rupiah)

Kementerian	Pagu APBN TA. 2021	Penghematan/ <i>Refocusing</i>	Pagu APBN TA. 2021 Setelah Penghematan	Percepatan Penarikan PHLN + Luncuran SBSN	Pagu APBN TA. 2021 Setelah Revisi
	A	B	A-B	C	(A-B)+C
Kementerian PUPR	149.811.139.618	17.999.744.026	131.811.395.592	3.084.602.243	134.895.997.835

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk memperhatikan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur, antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas Jalan Nasional dan Jalan Tol;
 - b. Revitalisasi irigasi dan bendungan demi mendukung ketahanan pangan;
 - c. Transparansi dan akuntabilitas tender;
 - d. Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur pasca bencana.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur program dan kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat dilingkup Kementerian PUPR sesuai dengan usulan dan masukan Komisi V DPR RI

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

Jakarta, 17 Maret 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASOEKI HADIMOELJONO

PIMPINAN RAPAT,



RIDWAN BAE